

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH (RLPPD) KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025**



## 1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Kabupaten Bekasi dapat dilihat dengan menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,13	76,8	0,88
2	Angka Kemiskinan	4,93	4,8	-2.637
3	Angka Pengangguran	8,87	8,82	-0.564
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,32	5,17	-2,82
5	Pendapatan PerKapita	121.647.169	128.692.888	5,792
6	Ketimpangan Pendapatan	0,397	0,367	-7.557

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi Tahun

### 1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan isu strategis yang capaiannya perlu dipantau. Untuk itulah, pembangunan manusia antarwilayah dimonitor dengan menghitung angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berdasarkan indikator pembentuknya, keempat indikator pembentuk IPM mengalami peningkatan. Indikator Umur Harapan Hidup (UHH) SP2010 penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2023 sebesar 74,30 tahun menjadi 74,57 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan



derajat kesehatan masyarakat suatu daerah baik dari prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, semakin meningkat Umur Harapan Hidup penduduk suatu daerah, menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bekasi juga meningkat dari tahun 2023 13,17 tahun menjadi 13,18 tahun pada tahun 2024. Artinya, penduduk di Kabupaten Bekasi memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA. Sementara itu, komponen ketiga rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bekasi mencapai 9,57 tahun pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 9,76 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan secara rata-rata penduduk Kabupaten Bekasi yang berusia 25 tahun keatas telah menyelesaikan pendidikan selama 9 tahun atau kelas IX SMP. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial yang cepat, pemerintah perlu membekali penduduk dengan keterampilan dan pengetahuan dasar. Meningkatnya angka HLS dan RLS dapat terus memacu pemerintah untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan utamanya bagi penduduk usia produktif yang sekarang paling banyak jumlahnya.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Bekasi masuk kedalam kuadran I yang artinya angka IPM tinggi dan pertumbuhan IPM diatas rata-rata provinsi. Hal ini perlu terus dipertahankan karena pertumbuhan IPM adalah capaian jangka panjang suatu daerah pada kualitas manusianya. Jika pertumbuhan IPM terus seperti sekarang, maka tidak lama lagi Kabupaten Bekasi akan memiliki angka IPM yang termasuk kategori sangat tinggi.

## **1.2 Angka Kemiskinan**

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Secara tidak langsung kemiskinan mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan dari suatu wilayah. Semakin tinggi angka kemiskinan, menggambarkan kurang berhasilnya pemerataan kesejahteraan antara masyarakat di wilayah tersebut. Selama periode 2023 – 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan dari 4,93 persen pada tahun 2023 menjadi 4,80 persen di tahun 2024. Penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi menggambarkan peningkatan kondisi perekonomian penduduk di Kabupaten Bekasi.

## **1.3 Angka Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 mencapai 8,87 persen dan TPT tahun 2024 menjadi sebesar 8,82 persen (mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan Agustus 2023). Penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi dikarenakan perekonomian di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 1.620 ribu orang, naik 27 ribu orang dibandingkan



Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,11 persen poin dari 65 persen menjadi 65,11 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.477 ribu orang, naik sebanyak 25 ribu orang dari Agustus 2023. Hanya pada lapangan pekerjaan jasa yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja, yaitu meningkat 78 ribu orang. Sedangkan pada lapangan pekerjaan pertanian dan industri mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja. Sebanyak 878 ribu orang (59,47 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun sebanyak 38 ribu orang jika dibandingkan Agustus 2023.

#### **1.4 Pertumbuhan Ekonomi**

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bekasi, yang diukur dengan beberapa indikator ekonomi salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bekasi cukup memberikan harapan terhadap peluang berinvestasi maupun memberikan dampak nilai tambah ekonomi terhadap masyarakat. Ini tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi selama 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi PDRB atas dasar harga konstan sebesar 5,17 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tertinggi pada tahun 2024 di Kabupaten Bekasi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan (13,64 persen), sektor konstruksi (8,14 persen), dan sektor jasa Pendidikan (11,39 persen), dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (10,99 persen). Sektor industri merupakan sektor paling dominan di Kabupaten Bekasi, sektor ini pada tahun 2024 mengalami Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,93 persen dan memberikan laju tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,88 persen. Hal ini disebabkan adanya penutupan pabrik besar yang terjadi di tahun 2024.

#### **1.5 Pendapatan Perkapita**

Pendapatan perkapita (percapita income) merupakan indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.

Pada tahun 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 3.273.868 jiwa, PDRB per kapita ADH berlaku Kabupaten Bekasi sebesar Rp128.692.888,00. Oleh karena itu, guna memantau perkembangan daya beli masyarakat secara riil dapat digunakan PDRB per kapita yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan. Bila PDRB nya tinggi dibagi dengan jumlah penduduk akan menyebabkan tinggi pula PDRB per kapita. Hal ini lah yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Akibat tingginya *output* sektor industri menyebabkan tinggi pula angka PDRB Kabupaten Bekasi, sehingga PDRB per kapita yang dihasilkan pun tinggi, walaupun pada kenyataannya masih banyak masyarakat Kabupaten Bekasi yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan dan memiliki daya beli yang rendah.



## 1.6 Ketimpangan Pendapatan

Salah satu indikator yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kesenjangan adalah Gini Rasio. Angka Gini Rasio Kabupaten Bekasi pada periode tahun 2010 – 2024 menunjukkan adanya fluktuasi dengan tren yang meningkat. Pada tahun 2024, rasio gini Kabupaten Bekasi sebesar 0,367. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2023 yang sebesar 0,397. Trend ketimpangan menurun, distribusi pengeluaran kelompok kaya dengan kelompok miskin mengalami perbaikan. Hal ini perlu mendapat perhatian agar kesenjangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Bekasi menurun.

## 2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pemerintah pilihan.

Berikut disampaikan capaian kinerja urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Bekasi tahun 2024:

### 2.1. URUSAN PENDIDIKAN

#### a. Capaian Kinerja Outcome

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	75,51
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	107,59
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	89,60	86,92
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	45,10

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Bekasi, 2024

#### b. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp892.878.142.275,00 dengan program/kegiatan sebagai berikut:



No	Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Urusan Pendidikan</b>		<b>910.891.551.221</b>	<b>892.878.142.275</b>	<b>98,02</b>
<b>1.</b>	Dinas Pendidikan	<b>600.660.191.050</b>	<b>586.638.503.610</b>	<b>97,66</b>
	A Program Pengelolaan Pendidikan	600.378.119.050	586.365.887.610	97,67
	B Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	282.072.000	272.616.000	96,65
<b>2.</b>	Dinas Ciptakarya	<b>310.231.360.171</b>	<b>306.239.638.665</b>	<b>98,71</b>
	A Program Pengelolaan Pendidikan	310.231.360.171	306.239.638.665	98,71

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bekasi

c. Permasalahan Yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan pendidikan di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Rapor Pendidikan yang menjadi salah satu sumber data pengisian laporan SPM masih banyak indikator data capaian yang kosong;
- 2) Sulitnya menghitung kebutuhan karena belum adanya data terpadu antara kebutuhan dan ketersediaan layanan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan penunjang SPM Pendidikan masih belum bisa dilaksanakan secara tepat waktu sesuai anggaran kas.

## 2.2. URUSAN KESEHATAN

a. Capaian Kinerja Outcome

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
<b>1</b>	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,90	1,87
<b>2</b>	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	94,44	96,36
<b>3</b>	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100
<b>4</b>	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100
<b>5</b>	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100
<b>6</b>	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	92,67	100
<b>7</b>	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	34,69
<b>8</b>	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	47,65	50,72



9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	91,34	98,30
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	79,86	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	76,28	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	68,61	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	34,40	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bekasi, 2024

b. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp11.912.333.265,00 dengan program/kegiatan sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Urusan Kesehatan</b>		<b>13.464.173.220</b>	<b>11.912.333.265</b>	<b>88,47</b>
1.	Dinas Kesehatan			
A	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13.464.173.220	11.912.333.265	88,47

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bekasi, 2024

c. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya keterlambatan dalam laporan di beberapa Puskesmas sehingga mempengaruhi dalam rekapitulasi data, serta pelaporan data belum lengkap atau terisi semua sehingga mempengaruhi isi pelaporan dan perlu konfirmasi kembali mengakibatkan pelaporan ke Provinsi, Kemenkes, dan Kemendagri terlambat;
- 2) Masih belum ada pedoman untuk penghitungan kebutuhan;
- 3) Masih kurang koordinasi kegiatan yang ada di masyarakat, belum adanya tim terkait SPM, koordinasi dan regulasi yang masih belum maksimal.

**2.3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

## a. Capaian Kinerja Outcome

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	99,95	99,95
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100	100
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	45,32	36,41
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	86,90	87,04
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,40	90,55
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	81,44	70,34
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100	21,33
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, 2024; Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bekasi, 2024,

## b. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp37.839.578.504,00 dengan program/kegiatan sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Urusan Pekerjaan Umum</b>		<b>39.128.786.156</b>	<b>37.839.578.504</b>	<b>97,70</b>
1	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi	9.846.113.957	9.770.915.562	99,24
A	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.846.113.957	9.770.915.562	99,24



<b>2</b>	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	<b>9.800.202.199</b>	<b>8.602.786.312</b>	<b>87,78</b>
A	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.800.202.199	8.602.786.312	87,78
<b>3</b>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	<b>19.482.470.000</b>	<b>19.465.876.630</b>	<b>99,91</b>
A	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	19.482.470.000	19.465.876.630	99,91

Sumber : Dinas SDA, DCKTR, Disperkimtan, 2024

c. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Perlunya koordinasi dengan pemerintah pusat, PDAM dan Dinas Kesehatan, mengenai metode pengumpulan data pelayanan air bersih di Kab. Bekasi yang belum terkompilasi dengan baik;
- 2) Hasil perhitungan kebutuhan pelayanan air bersih belum update dengan jumlah penduduk yang belum mendapatkan pelayanan air bersih di Kab. Bekasi.

**2.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

a. Capaian Kinerja Outcome

<b>NO</b>	<b>Indikator Kinerja Kunci</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)</b>
<b>1</b>	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	80,5
<b>2</b>	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	100
<b>3</b>	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	69,09	65,67
<b>4</b>	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,10	0,17
<b>5</b>	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100	22,35

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bekasi, 2024

b. Realisasi belanja Urusan Perumahan Rakyat

Realisasi belanja Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp1.899.274.606,00 dengan program/kegiatan sebagai berikut:



No	Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Urusan Perumahan Rakyat</b>		<b>3.470.821.250</b>	<b>1.899.274.606</b>	<b>45,72</b>
1.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	3.470.821.250	1.899.274.606	45,72
	A Program Pengembang Perumahan	3.470.821.250	1.899.274.606	45,72

Sumber : Disperkimtan, 2024

c. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Rehabilitasi atau relokasi rumah korban bencana harus berkoordinasi dengan BPBD sedangkan bencana alam tidak dapat diprediksi dalam satu tahun anggaran, namun penganggaran sudah dilakukan untuk kebutuhan SPM urusan perumahan rakyat;
- 2) Penyerahan bantuan dilaksanakan dengan cara penggantian *aset by asset*, sedangkan masih terdapat penerima manfaat yang tanahnya berlokasi di tanah pemerintah sehingga tidak dapat dilaksanakan.

## 2.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. Capaian Kinerja Outcome

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	82
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	16 Menit	15,35 Menit

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bekasi, 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bekasi, 2024, Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Bekasi, 2024



## b. Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas

Realisasi belanja Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp30.901.522.893,00 dengan program/kegiatan sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Urusan Trantibumlinmas</b>		<b>32.666.254.616</b>	<b>30.901.522.893</b>	<b>94,59</b>
<b>1</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>15.500.761.225</b>	<b>14.699.296.545</b>	<b>94,83</b>
A	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	15.500.761.225	14.699.296.545	94,83
<b>2</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>8.286.254.681</b>	<b>7.704.050.450</b>	<b>92,97</b>
A	Program Penanggulangan Bencana Daerah	8.286.254.681	7.704.050.450	92,97
<b>3</b>	<b>Dinas Pemadam Kebakaran</b>	<b>8.879.238.710</b>	<b>8.498.175.898</b>	<b>95,71</b>
A	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	8.879.238.710	8.498.175.898	95,71

Sumber : Satpo PP, BPBD, Dinas Damkar, 2024

## c. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Proses pengumpulan data sulit dilakukan karena belum maksimalnya pendataan dalam perencanaan SPM dan kurang nya SDM yang berkompeten untuk melakukan pendataan secara cepat dan valid, terutama dalam mengumpulkan data warga Kabupaten Bekasi *by name by address*;
- 2) Penghitungan kebutuhan penerapan SPM sulit dilakukan karena basis data informasi belum tersusun secara komprehensi;
- 3) Dalam renstra indikator SPM belum digunakan sebagai dasar perencanaan program, sub indikator pendukungnya belum memuat dalam indikator kegiatan sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan barang/jasa, personil dan pelayanan dasar sub urusan yang tidak dapat dianggarkan;
- 4) Kurangnya koordinasi dan Kerjasama dengan *stake holder* terkait pemenuhan layanan SPM.



## 2.6 URUSAN SOSIAL

### a. Capaian Kinerja Outcome

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kab. Bekasi, 2024

### b. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 sebesar Rp4.807.094.973,00 dengan program/kegiatan sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>Urusan Sosial</b>				
1	<b>Dinas Sosial</b>	<b>5.640.339.870</b>	<b>4.807.094.973</b>	<b>85</b>
	A Program Rehabilitasi Sosial	4.251.417.120	3.871.289.483	91
	B Program Penanganan Bencana	1.388.922.750	935.805.490	67

Sumber : Dinas Sosial Kab. Bekasi, 2024

### c. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Dibutuhkan waktu lebih dalam proses pembuatan surat Permohonan untuk Permintaan Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah/Camat hal ini dikarenakan wajib melampirkan *By Name By Address* (BNBA);
- 2) Dibutuhkan waktu lebih dalam proses Assesment dan Penyaluran Bantuan Sosial yang disesuaikan dengan permintaan pada surat permohonan serta disesuaikan dengan Persediaan Logistik;
- 3) Kurangnya anggaran pelaksanaan SPM, hal ini dikarenakan beberapa sub kegiatan yang mendukung SPM tidak *tercover* anggaran.



### 3. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

#### 3.1 Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022, belum terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri perihal perolehan Skor serta status capaiannya.

#### 3.2 Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas laporan Keuangan. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal.

### 4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Audit/Unaudit) Tahun 2024. Realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi Tahun 2024 mencapai sebesar Rp7.186.021.408.378,00 dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 mencapai Rp7.221.336.012.549,00. Secara rincian, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
4.1	Pendapatan Daerah	7.378.159.218.107,00	7.186.021.408.378,00	97,40

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
5.1	Belanja Daerah	7.811.280.542.056,00	7.221.336.012.549,00	92,42

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Bekasi, 2024



## 5. INOVASI

Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 memiliki inovasi diantaranya yaitu:

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	BENTUK INOVASI
1	Warung Bang Juned dan Mpok Solihah	Sekretariat DPRD	Inovasi Pelayanan Publik
2	SIMPEL CSR (Sistem Informasi Pelaporan CSR)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Inovasi Daerah Lainnya
3	Pelaksanaan Penilaian Oleh Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
4	Sistem Aplikasi SAPA BEKASI (Sistem Aplikasi Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi)	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi	Inovasi Pelayanan Publik
5	Sistem Aplikasi Web Register	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi	Inovasi Bertema Teknologi Lainnya
6	GETAK (CeGah Tangani Kekerasan)	Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi	Inovasi Pelayanan Publik
7	SIJAKA DEBEST (Sistem Informasi Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bekasi Sehat)	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik
8	SIP-Kerja (Sistem Informasi Pasar Kerja Kabupaten Bekasi)	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi	Inovasi Pelayanan Publik
9	SIPENSIL (Sistem Pendaftaran, Pencatatan Pelatihan Kompetensi, Wirausaha dan Softskill)	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi	Inovasi Daerah Lainnya
10	SIKETUM MAKIN BERANI (Sistem Informasi Ketertiban Umum Mantapkan Kinerja Dalam Bekerja dan Melayani)	Satuan Polisi Pamong Praja Kab Bekasi	Inovasi Pelayanan Publik
11	LAYANAN PANGLING TERUS (Pelayanan Laboratorium Lingkungan Terakreditasi dan Teregistrasi)	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi	Inovasi Daerah Lainnya
12	SABDA ALAM (Siap Bekerja Datang Melayani Akta Kelahiran dan Akta Kematian)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi Pelayanan Publik



13	DIGITALISASI PERMOHONAN ANDALALLIN (Analisis Dampak Lalu Lintas) dan Permohonan Izin Parkir	Dinas Perhubungan	Inovasi Pelayanan Publik
14	Digitalisasi Laporan Penanganan Kejadian Kebakaran (8_Kekar)	Dinas Pemadam Kebakaran	Inovasi Daerah Lainnya
15	(Bekasi Nyambung Bae) Bebunge 2.0	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	Inovasi Pelayanan Publik
16	Bekasi <i>One Stop Service</i> (BOSS) (Penambahan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan serta peningkatan Fitur Keamanan)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi	Inovasi Pelayanan Publik
17	SIPETARUNG (Sistem Pelayanan Tera Tera Ulang)	Dinas Perdagangan	Inovasi Pelayanan Publik
18	SIP-BAPOKTING (Sistem Informasi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting Berbasis Digital)	Dinas Perdagangan	Inovasi Pelayanan Publik
19	SIMPUM (Sistem Informasi Manajemen Pemberdayaan Usaha Mikro)	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Inovasi Pelayanan Publik
20	LayananBAIKppa (Layanan yang Bijak, Adil, Informatif, dan Komprehensif dalam Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Inovasi Pelayanan Publik
21	Perpustakaan Digital "iBekasiKab"	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Inovasi Pelayanan Publik
22	UNIT REAKSI CEPAT (URC) - Lapor Jalan	Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi	Inovasi Daerah Lainnya
23	SIPKALI (Sistem Informasi Produksi Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan)	Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi	Inovasi Pelayanan Publik
24	GEROBAK KURING (Gerakan Pengobatan dan Edukasi Keliling)	Dinas Pertanian	Inovasi Pelayanan Publik
25	CANTINGMAS (Cegah dan Tangani Stunting bersama Masyarakat)	RSUD Kabupaten Bekasi	Inovasi Pelayanan Publik



26	SPIN (Sistem Pemantauan Izin Tenaga Kesehatan)	RSUD Cabangbungin	Inovasi Pelayanan Publik
27	DRUPADI (Deteksi Resiko Utama Kanker Payudara Dini)	RSUD Cabangbungin	Inovasi Pelayanan Publik
28	KOIN BERLIAN (Konsultasi dan Informasi Obat Berorientasi Pelayanan)	RSUD Cabangbungin	Inovasi Bertema Teknologi Lainnya
29	MENARA BTS (MENUju ARAh Kab Bekasi Telinga Sehat)	Komite Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian (Komda PGPKT) Bekasi Raya	Inovasi Pelayanan Publik
30	PRAJA SAKTI (Pelayanan Bersama Jemput Bergerak Dalam Sistem Administrasi Terintegrasi)	Kecamatan Cikarang Barat	Inovasi Pelayanan Publik
31	CS BERILA MAS SEJATI (Cikarang Selatan Memberi Layanan kepada Masyarakat dengan Sepenuh jiwa dan hati)	Kecamatan Cikarang Selatan	Inovasi Pelayanan Publik
32	Membangun Sinergitas Tiga Pilar Kecamatan Cikarang Utara dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Menuju Bekasi Makin Berani	Kecamatan Cikarang Utara	Inovasi Daerah Lainnya
33	SINERGI BOMA (Sistem Informasi Elektronik Terintegrasi Kecamatan Bojongmangu)	Kecamatan Bojongmangu	Inovasi Pelayanan Publik
34	SIPAKETAN (Sistem Informasi Pendataan Kemiskinan Tepat Sasaran)	Kecamatan Tambun Utara	Inovasi Daerah Lainnya
35	SEPEDA ANTIK (Sistem Pelayanan Digital Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Serang Baru)	Kecamatan Serang Baru	Inovasi Pelayanan Publik



36	SIPALING PENTING EMAS (Sistem Informasi Pantau Lingkungan Dalam Pengentasan Stunting Bersama Masyarakat)	Kecamatan Tarumajaya	Inovasi Pelayanan Publik
37	Pengelolaan Arsip Berbasis Private Cloud Storage Di Lingkungan Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi	Kecamatan Sukawangi	Inovasi Pelayanan Publik
38	Jemput Bola Pelayanan (Jebolan) PBB	Kelurahan Kebalen	Inovasi Pelayanan Publik
39	LAHAP SATE (Laporan Harian Pekerjaan Satuan erTE)	Kelurahan Kertasari	Inovasi Pelayanan Publik
40	SEKARPET BAHAGIA (Sekolah Kejar Paket A, B, C Gratis Kelurahan Bahagia)	Kelurahan Bahagia	Inovasi Pelayanan Publik
41	GEMA INSANI (Gerakan Bersama Intervensi Stunting Sejak Dini)	Kelurahan Setia Asih	Inovasi Bertema Teknologi Lainnya
42	SAPA (Sistem Aplikasi Pelayanan Administrasi)	Kelurahan Sertajaya	Inovasi Pelayanan Publik
43	Cepat Tanggap Cegah TBC	Puskesmas Tridayasakti	Inovasi Pelayanan Publik
44	IBU PETA GIRANG (Inovasi Peran Pelayanan Antenatal Care (Anc) Dalam Pencegahan Gizi Kurang)	Puskesmas Mekarsari	Inovasi Pelayanan Publik
45	KABAYAN TIBA (Kader Bahagia Melayani Tb Paru Di Bahagia)	Puskesmas Bahagia	Inovasi Pelayanan Publik
46	GEBER ASIK (Gerakan Bersama Entry Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Puskesmas Sukamahi	Inovasi Daerah Lainnya
47	KIPAS ANGIN (Kelompok Ibu Pendukung ASI Atasi Stunting Indonesia)	Puskesmas Ridogalih	Inovasi Pelayanan Publik
48	TELADAN CERIA (Teman Tablet Tambah Darah Untuk Cegah Resiko Anemia)	Puskesmas Cibatu	Inovasi Pelayanan Publik
49	S'PeDes Cabay (Skrining Pegawai Desa Se-Kecamatan Pebayuran)	Puskesmas Pebayuran	Inovasi Pelayanan Publik
50	JARI ISTIMEWA (Jaring Riwayat Imunisasi Setiap Wanita)	Puskesmas Karangreja	Inovasi Pelayanan Publik



51	KENCANI SI DIA (Kenali Secara Dini Hipertensi Dan Diabetes)		Inovasi Pelayanan Publik
52	DATUK SEJATI (Datangi Untuk Kesehatan Jiwa dan Hati)	Puskesmas Karangharja	Inovasi Pelayanan Publik
53	GEMASS PADU (GERakan MAsyarakat Sadar Stunting terPADU)	Puskesmas Sukasejati	Inovasi Pelayanan Publik
54	LAIK SALIN (Pelayanan Klinik Sanitasi Online)	Puskesmas Sukaraya	Inovasi Pelayanan Publik
55	SI ALPAMIL (Aplikasi Alarm Pemantau Ibu Hamil)	Puskesmas Cipayung	Inovasi Pelayanan Publik
56	OPPO PHD (Optimalkan Posbindu PTM “Penyakit Tidak Menular” Obati Penderita Hipertensi Diabetes)	Puskesmas Babelan II	Inovasi Pelayanan Publik
57	Gema Si Pepes (Gerakan Bersama Bersinergi Peduli Penurunan Stunting)	Puskesmas Setiamulya	Inovasi Pelayanan Publik
58	LIGA EMAS ( Peduli Tanaman Obat Keluarga (TOGA) dengan Edukasi Menuju Masyarakat Mandiri dan Sehat)	Puskesmas Karangbahagia	Inovasi Pelayanan Publik
59	ADU CINTA (Anc Terpadu Cegah Kematian Ibu dan Anak)	Puskesmas Sukajaya	Inovasi Pelayanan Publik
60	ANJELIKA (Antar Jemput Ibu Bersalin Ke Puskesmas)	Puskesmas Karang Mulya	Inovasi Daerah Lainnya
61	SI MIA TING TING! (Atasi Anemia Remaja Putri, Penting Mencegah Stunting)	Puskesmas Lambangsari	Inovasi Daerah Lainnya
62	JEMARI EMAS (Jabat Erat Mental Remaja dIni menuju generasi EMAS)	Puskesmas Lambangsari	Inovasi Pelayanan Publik
63	SEMERBAK MELATI (Semangat meraih berkah melayani lansia sepenuh hati)	Puskesmas Sumberjaya	Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
64	MABAL (Bermain dengan Gym Ball)	Puskesmas Sirnajaya	Inovasi Pelayanan Publik
65	KITA SEHATI (Kartu Informasi Kusta Sehat Bahagia Tidak Mudah Menyerah)	Puskesmas Sukadami	Inovasi Pelayanan Publik



66	Pa MaMat (Puskesmas Masuk Majelis Taklim)	Puskesmas Cabangbungin	Inovasi Pelayanan Publik
67	LOBSTER KEPITING (Layanan Observasi Terpadu Kegiatan Intervensi Stunting)	Puskesmas Jatimulya	Inovasi Pelayanan Publik
68	LUNASUHA (Lanjut Usia Nikmat Dengan Akal Sehat Hidup BahagiA)	Puskesmas Karang Satria	Inovasi Pelayanan Publik
69	BUMATELI SAMPER BUMILLA (Buka Mata Buka Telinga Bersama Masyarakat Perhatikan Ibu Hamil dan Melahirkan)	Puskesmas Karang Satria	Inovasi Pelayanan Publik
70	KP KASIHI ASI (Kelompok pendukung ASI Karena ASI Hidup Indah Anak Sehat Ibu Hebat)	Puskesmas Tarumajaya	Inovasi Pelayanan Publik
71	SILAW (Sistem Informasi Laporan Walkr "Waluya Karang Raharja")	Puskesmas Waluya	Inovasi Pelayanan Publik
72	KUMIS MANJA (Kumpulan Informasi Kesehatan Puskesmas Mangunjaya)	Puskesmas Mangunjaya	Inovasi Pelayanan Publik
73	Klaster Manis Manja (Kelompok Sehat Terkendali bersama Prolanis Mangunjaya)	Puskesmas Mangunjaya	Inovasi Pelayanan Publik
74	TOPI CAPING (TOP nya Pelayanan Cibuntu Atasi Stunting)	Puskesmas Cibuntu	Inovasi Pelayanan Publik
75	Manekin (Manajemen Ekin)	Puskesmas Cibuntu	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah
76	BATU LIONTIN ( Babelan Satu Layanan Informasi Calon Pengantin )	Puskesmas Babelan I	Inovasi Pelayanan Publik
77	Jubah Merah (Jumat Berkah Minum Tablet Tambah Darah)	Puskesmas Muaragembong	Inovasi Pelayanan Publik
78	SI PELIX CETING (kolaboraSI Penta helIX Cegah stunTING)	Puskesmas Lemahabang	Inovasi Pelayanan Publik
79	GEROBAK TING-TING (Gerakan Observasi Bayi Risiko Stunting)	Puskesmas Cibusah	Inovasi Pelayanan Publik
80	MAS SAJI (Mari Sayangi Sakit Jiwa)	Puskesmas Telaga Murni	Inovasi Pelayanan Publik



81	CANTING MANISE (Cegah Stunting dan Anemia Makan Bergizi dan Suplemen Fe)	Puskesmas Sukaindah	Inovasi Pelayanan Publik
82	PARIS MEMBARA (Pencegahan Stunting Pada Remaja Putri Sekolah Melalui Pemberian Tablet Tambah Darah)	Puskesmas Setu I	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah
83	Aplikasi Pencatatan Kontrak (PECAK) PKWT	Dinas Ketenagakerjaan	Inovasi Daerah Lainnya
84	Sistem Aplikasi Pengawasan (SIAP)	Inspektorat	Aplikasi yang dibuat untuk menyajikan informasi secara komprehensif mulai dari Perencanaan (PKPT), Pelaksanaan (Surat Tugas dan Kendali Mutu), Pelaporan (LHP) dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP).
85	SAMISAMI	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pelayanan

Cikarang Pusat, 25 Maret 2025

BUPATI BEKASI



ADE KUSWARA KUNANG, S.H